



RENCANA STRATEGIS 2021-2026



**DINAS KESEHATAN
KAB. KUTAI KARTANEGARA**

melayani lebih baik

Jl. Cut Nyak Dhin no.33, Tenggarong,
Telp.(0541)661082 Fax. (0541) 662258
Kode Pos 75579

Website :

dinkes.kutaikartanegara.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN

Jln.Cut Nyak Dien No. 33 Telp.(0541) 661082 Fax. (0541) 662258 Kode Pos 75512

Website : www.dinkes.kutaikartanegarakab.go.id E-mail: dinaskesehatan.kukar@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : B. **4203** /DINKES/SKRT-SKEU/IX/2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) memuat arahan kebijakan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 1 September 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



dr.MARTINA YULIANTI, Sp.PD.FINASIM., M.Kes(MARS)

Pembina Utama Muda

NIP. 19710712 200012 2 002

Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen penting dalam pemerintahan yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan, indikator, target, kerangka pendanaan, sampai dengan kerangka regulasinya dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Dinas Kesehatan sebagai Perangkat dari Kementerian/Lembaga yang berada di daerah menyusun Renstra dengan mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2021-2026, serta dilaksanakan oleh seluruh *stakeholders* jajaran kesehatan baik di kabupaten maupun kecamatan termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusunan Renstra yang telah membantu penyusunan Renstra Dinas Kesehatan ini melalui proses *top-down* dan *bottom-up* serta seluruh pihak yang telah tulus membimbing dalam penyempurnaan penyusunan Renstra ini. Semoga upaya-upaya yang secara maksimal telah dilakukan menjadi persembahan terbaik bagi peningkatan kinerja masa depan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada kesempatan ini pula saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna tercapainya sasaran pembangunan kesehatan.

Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin.

Tenggarong, 1 September 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kutai Kartanegara



dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM., M.Kes(MARS)

Pembina Utama Muda

NIP. 19710712 200012 2 002

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	30
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	39
BAB IV Tujuan dan Sasaran	45
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	48
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	51
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	74
BAB VIII Penutup	80

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kab.Kutai Kartanegara Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	10
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas KesehatanKab.Kutai Kartanegara Berdasarkan Kualifikasi Pangkat dan Golongan	11
Tabel 2.3	Sumber Pembiayaan Dinas Kesehatan Kab.Kutai Kartanegara	13
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara	15
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	23
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	47
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	50
Tabel T-C 27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.....	52
Tabel T-C. 28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	76

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	9
Gambar 2.2	Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2017-2020.....	20
Gambar 2.3	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2017-2020	21
Gambar 2.4	Prevalensi Kurang Gizi pada Balita di Kabupaten Kutai KertanegaraTahun 2017-2020.....	21
Gambar 2.5	Cakupan Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun 2017-2020.....	22

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan kegiatan, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Pencapaian tujuan pembangunan nasional merupakan akumulasi dari keberhasilan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah: "**Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia**". Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut, maka diselenggarakan program pembangunan daerah secara terpadu, terarah, terencana dan berkelanjutan. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur implementasi strategi desentralisasi di Indonesia, menetapkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah termasuk pembangunan kesehatan. Pada undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang perencanaan

pembangunan nasional, telah menetapkan bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan daerahnya termasuk pembangunan kesehatan daerah sesuai dengan kemampuan, kondisi dan kebutuhan daerah sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan daerah masing-masing.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada level provinsi/kabupaten dan dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) pada level unit pelaksana, dan tahunan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada level provinsi/kabupaten dan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pada level unit pelaksana.

Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dimana RPJMD memberikan pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan dan dipedomani oleh SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD, dimana kedua dokumen tersebut dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 disusun sebagai instrumen untuk menerjemahkan dan mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra ini disusun dengan berprinsip secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan berlandaskan hukum-hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
22. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua tentang Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 di bidang Pembangunan Kesehatan;
- b. Pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama periode Tahun 2021-2026;
- c. Menentukan arah kebijakan, sasaran, program dan kegiatan prioritas Dinas Kesehatan dalam perencanaan jangka menengah.

Dasar penilaian kinerja yang mencerminkan yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang transparan dan akuntabel yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan kebijakan lainnya dari Bupati Kutai Kartanegara periode Tahun 2021-2026;
- b. Tersusun dan ditetapkannya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara periode Tahun 2021-2026;
- c. Tersusunnya pedoman bagi penyusunan berbagai kebijakan di bidang kesehatan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan di bidang kesehatan dalam periode Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Startegis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Tugas Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah bidang kesehatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

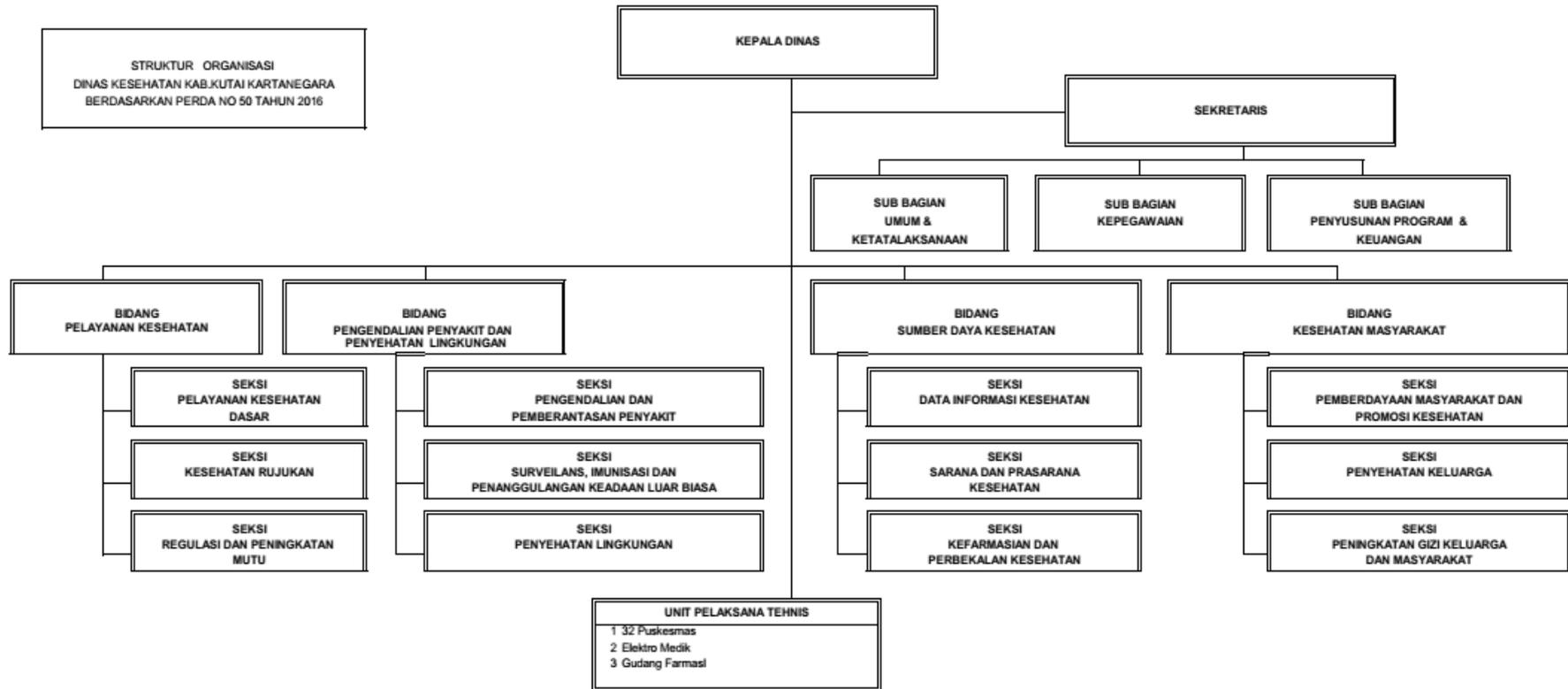
- a. Perumusan kebijakan di Bidang Kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Kesehatan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan;
 - a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan;

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
- b. Seksi Kesehatan Rujukan
- c. Seksi Regulasi dan Peningkatan Mutu
4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2/PL), membawahi;
 - a. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Keadaan Luar Biasa (KLB)
 - b. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan
5. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi;
 - a. Seksi Penyehatan Keluarga
 - b. Seksi Peningkatan Gizi Keluarga dan Masyarakat
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi;
 - a. Seksi Data Informasi Kesehatan
 - b. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - a. UPTD Puskesmas
 - b. UPTD Elektromedik Daerah
 - c. UPTD Gudang Farmasi Daerah
8. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara

2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

Dalam mencapai status kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan sumber daya kesehatan, meliputi tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sarana kesehatan. Berikut situasi sumber daya kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen yang terpenting dalam menjalankan fungsi dan tugas suatu perangkat daerah. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 sebanyak 917 orang PNS, 949 orang THL, 105 orang tenaga BOK, 31 orang tenaga BLUD, 6 orang tenaga Nusantara Sehat (NS) dengan Kualifikasi sebagai berikut :

a. Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	DINAS KESEHATAN		UPTD. PUSKESMAS					UPTD. GUDANG FARMASI KABUPATEN		UPTD. ELEKTRO MEDIK	
		PNS	THL	PNS	THL	BLUD	BOK	NS	PNS	THL	PNS	THL
1	S3 Kesehatan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	S2											
	- S2 Kesehatan	16	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-
	- S2 Umum	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- S2 Apoteker	3	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-
3	S1											
	- S1 Kesehatan Masyarakat	19	6	56	81	-	25	-	-	-	-	-
	- S1. Keperawatan	1	-	21	4	1	-	-	-	-	-	-
	- S1. Farmasi	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	- S1. Apoteker	-	-	-	24	1	3	1	-	-	-	-
	- S1. Gizi	-	-	-	2	-	13	-	-	-	-	-
	- S1. Umum	11	7	18	7	-	-	-	1	-	1	-
	- S1 Kesling	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	- S1 Teknik Komputer	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-
	- Dokter umum	10	-	46	16	10	-	-	-	-	-	-
	- Dokter Gigi	-	-	27	2	2	-	-	-	-	-	-
	- Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pengelola keuangan	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-
	- Keperawatan Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	D IV											
	- D IV Kebidanan	3	-	31	2	-	-	-	-	-	-	-
	- D IV Keperawatan	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
	- D IV Akuntansi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5	D III											

NO	JENJANG PENDIDIKAN	DINAS KESEHATAN		UPTD. PUSKESMAS					UPTD. GUDANG FARMASI KABUPATEN		UPTD. ELEKTRO-MEDIK	
		PNS	THL	PNS	THL	BLUD	BOK	NS	PNS	THL	PNS	THL
-	D III Keperawatan	6	1	227	231	4	-	-	-	-	-	-
-	D III Kebidanan	3	2	197	291	6	-	-	-	-	-	-
-	D III Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	D III gizi	-	-	4	5	1	9	2	-	-	-	-
-	D III farmasi	1	-	10	31	2	-	-	-	1	-	-
-	D III Analis	-	-	10	38	1	-	-	-	-	1	-
-	D III Kesling	1	-	5	16	-	11	3	-	-	-	-
-	D III Gigi	-	-	15	2	1	-	-	-	-	-	-
-	D III Akupuntur	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	D III Umum	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
-	D III Rekam Medik	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	D III Teknik Elektromedik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	D III Tehnik Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	D III Manajemen computer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	D II											
-	Ilmu Agama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	D I											
-	SPK perawat	-	-	13	2	-	-	-	-	-	-	-
-	SPK Bidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	SPRG	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	SPAG	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	SMF	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	SPPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	SMAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	SPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	SLTA Sederajat	37	31	88	125	-	-	-	5	3	3	2
-	SMK Analis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	SMK Farmasi	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
9	SLTP Sederajat	1	-	15	1	-	-	-	1	-	-	-
10	SD	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	120	49	817	894	31	105	6	8	4	7	2

b. Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Tabel 2.2

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kab.Kutai Kartanegara
Berdasarkan Kualifikasi Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	DINAS KESEHATAN	UPTD. PUSKESMAS	UPTD. GUDANG FARMASI KABUPATEN	UPTD. ELEKTRO-MEDIK
1	Pembina UtamaMadya / IV D	-	-	-	-
2	Pembina UtamaMuda / IV C	1	7	-	-
3	Pembina Tingkat I / IV B	3	18	1-	-
4	Pembina / IV A	11	27	-	1
5	Penata Tingkat I / III D	26	193	-	2
6	Penata / III C	23	78	-	-
7	PenataMuda Tingkat I / III B	26	168	4	1
8	PenataMuda / III A	3	85	-	-

NO	PANGKAT/GOLONGAN	DINAS KESEHATAN	UPTD. PUSKESMAS	UPTD. GUDANG FARMASI KABUPATEN	UPTD. ELEKTRO-MEDIK
9	Pengatur Tingkat I / II D	16	80	-	2
10	Pengatur / II C	8	87	1	1
11	PengaturMuda Tingkat I / II B	2	22	1	-
12	PengaturMuda / II A	-	12	-	-
13	Juru Tingkat I / I D	-	3	1	-
14	Juru / I C	1	1	-	-
15	JuruMuda Tingkat I / I B	-	1	-	-
JUMLAH		120	782	8	7

2.2.2. Sumber Daya Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sarana dan Prasarana Kesehatan yang dimiliki Dinas Kesehatan dan Jaringannya sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan : 1 Unit
- b. UPTD GudangFarmasi : 1 Unit
- c. UPTD Elektromedik : 1 Unit
- d. UPTD Puskesmas : 32 Unit
- e. Puskesmas Pembantu : 177 Unit
- f. Posyandu : 781 Buah
- g. Kendaraan Operasional :
 1. Mobil Puskesmas Keliling (pusling) (Roda 4) : 39Unit
 2. Mobil Operasional
 - Operasional Dinkes : 16 Unit
 - Operasional Puskesmas : 36 Unit
 3. Roda Dua : 484 Unit
 4. Pusling Air : 5 unit

2.2.3. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan setiap tahunnya melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan lebih lanjut dalam dokumen Pelaksana

Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Anggaran pembiayaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, selain bersumber dari Pemerintah Daerah (APBD) juga diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Tabel 2.3
Sumber Pembiayaan Dinas Kesehatan Kab Kutai Kartanegara

No	Tahun	Uraian	Alokasi	Realisasi
1	2016	APBD Kab. Kutai Kartanegara		
		• Belanja Langsung	193.108.857.295,00	138.910.298.733,00
		• Belanja Tidak Langsung	109.141.391.581,70	106.221.411.532,00
		• BLUD	32.526.425.213,73	26.150.087.827,60
		APBD Provinsi Kaltim		
		• Bankeu		
		APBN		
		• DAK	18.048.110.960,00	8.636.242.727,00
2	2017	APBD Kab. Kutai Kartanegara		
		• Belanja Langsung	199,545,208,678,00	98,936,186,418,00
		• Belanja Tidak Langsung	106.128.543.511,12	96.713.165.998,00
		• BLUD	38.518.119.903,92	31.765.857.083,67
		APBD Provinsi Kaltim		
		• Bankeu		
		APBN		
		• DAK	26.741.469.000,00	16.992.294.753,00
3	2018	APBD Kab. Kutai Kartanegara		
		• Belanja Langsung	192.236.837.508,00	135.731,506,793,00
		• Belanja Tidak Langsung	91.791.782.352,24	90.850.568.158,11
		• BLUD/	36.613.729.868,27	31.040.032.211,92
		APBD Provinsi Kaltim		
		• Bankeu		
		APBN		
		• DAK	35.436.356.870,00	28.704.162.352,00
4	2019	APBD Kab. Kutai Kartanegara		
		• Belanja Langsung	166.352.830.108,00	129.382.829.275,00
		• Belanja Tidak Langsung	99.064.338.929,61	93.107.040.441,14
		• BLUD	38.731.607.316,72	32.752.892.984,71
		APBD Provinsi Kaltim		
		• Bankeu		
		APBN		
		• DAK	48.570.117.000,00	37.476.812.361,00
5	2020	APBD Kab. Kutai Kartanegara		
		• Belanja Langsung	174.747.727.586,56	129.644.019.377,00
		• Belanja Tidak Langsung	103.797.944.086,80	97.914.456.392,95
		• BLUD	42.515.991.994,90	33.671.110.514,33
		APBD Provinsi Kaltim		
		• Bankeu		
		APBN		
		• DAK	69.536.617.000,00	43.347.176.027,00

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dianalisa untuk dapat menunjukkan seberapa besar perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kesehatan, seberapa kuat daya dukung sumber daya perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, tingkat ketercapaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, perbandingan capaian kinerja antara Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, serta hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Indikator Kinerja merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan indikator kinerja perangkat daerah yaitu untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome).

Pada Permendagri No. 18 Tahun 2020, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdapat IKK Outcome yang perlu dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Akan tetapi IKK Outcome berisikan SPM kesehatan yang sudah menjadi indikator sasaran dan tertuang dalam tabel TC-23.

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel T-C23.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah kematian ibu		23		27	26	25	24	23	35	22	24	30		130	85	96	125	
2	Angka Kematian Bayi		146		190	179	168	157	146	219	178	167	186		115	99	99	118	
3	Prevalensi Kurang Gizi pada balita		16		20,4	19,3	18,1	17	16	23	16,7	14,26	11,75		113	87	79	69	
4	Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem pengawasan internal (SPI) 100%		100		45	60	75	90	100	45	60	75	90		100	100	100	100	
5	Cakupan dokumen perencanaan 100%		100		50	75	90	100	100	100	100	100	100		200	133	111	100	
6	Cakupan LKjIP 100%		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
7	Cakupan tindak lanjut terhadap hasil audit dari pengawasan internal maupun pengawasan eksternal		100		100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100	0	
8	Cakupan penerapan zona integritas 100%		100		0	25	50	75	100	0	0	0	0		0	0	0	0	
9	Cakupan penerapan kawasan birokrasi bebas korupsi 100%		100		0	25	50	75	100	0	0	0	0		0	0	0	0	
10	cakupan desa/kelurahan		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam																		
11	Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan upaya pengendalian penyakit tidak menular 100%		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
12	Cakupan puskesmas yang mengembangkan POSBINDU 100%		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
13	Kualitas sanitasi dasar 100%		100		85	90	95	100	100	12,02	56,6	71,7	79		14	63	75	79	
14	Cakupan Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (70%).		70		57	61	65	70	70	40,8	40,6	39,53	25,49		72	67	61	36	
15	Cakupan desa siaga aktif 80%		80		71	74	77	80	80	50,2	56,1	70,04	70,04		71	76	91	88	
16	Indeks kepuasan masyarakat > 90%		90		80	80	90	90	90				92		0	0	0	102	
17	Persentase masyarakat miskin memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah 100%.		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
18	Persentase cakupan puskesmas terakreditasi 100%		100		48	72	100	100	100	59,4	75	100	100		124	104	100	100	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	SPM Kesehatan																		
1	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		100		100	100	100	100	100	79,03	73,59	89,72	95,17		79	74	90	95	
2	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		100		100	100	100	100	100	80,22	72,67	91,04	103,71		80	73	91	104	
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		100		100	100	100	100	100	74,46	77,45	80,95	120,39		74	77	81	120	
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita		100		100	100	100	100	100	46,89	52,03	54,22	48,21		47	52	54	48	
5	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Pendidikan Dasar		100		100	100	100	100	100	95,94	95,5	97,81	97,89		96	96	98	98	
6	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		100		100	100	100	100	100	0	19,1	23,78	34,15		0	19	24	34	
7	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		100		100	100	100	100	100	6,38	43,68	33,44	56,2		6	44	33	56	
8	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		100		100	100	100	100	100	23,47	27,8	26,91	22,2		23	28	27	22	
9	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus		100		100	100	100	100	100	62,43	39,4	87,75	82,42		62	39	88	82	
10	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa		100		100	100	100	100	100	100	100	86	84,2		100	100	86	84	
11	Persentase Pelayanan		100		100	100	100	100	100	92,37	94,87	51,91	51,25		92	95	52	51	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Renstra Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Kesehatan Orang Dengan TB																		
12	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko terinfeksi HIV		100		100	100	100	100	100	46,72	69,6	79,43	94,36		47	70	79	94	

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kutai Kartanegara

dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM., M.Kes(MARS)

Pembina Utama Muda
NIP. 19710712 200012 2 002

Pada pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat indikator kinerja yang telah mencapai target yang telah ditetapkan diantaranya yaitu :

- a. Cakupan dokumen perencanaan 100%
- b. Cakupan LKjIP 100%
- c. Cakupan tindak lanjut terhadap hasil audit dari pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.
- d. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam.
- e. Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan upaya pengendalian penyakit tidak menular 100%
- f. Cakupan puskesmas yang mengembangkan POSBINDU 100%
- g. Persentase masyarakat miskin memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah 100%.
- h. Persentase cakupan puskesmas terakreditasi 100%

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tidak terlepas dari peran dan kerja sama dari berbagai pihak, baik internal Dinas Kesehatan maupun kerja sama dengan instansi terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan dan tindak lanjut terhadap hasil audit.

Upaya pengendalian penyakit tidak menular dilaksanakan diseluruh fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya dengan pengembangan POSBINDU. Keberhasilan pengembangan POSBINDU tidak hanya dari peran petugas kesehatan dalam sosialisasi dan advokasi, tetapi juga peran serta masyarakat yang ikut andil dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik.

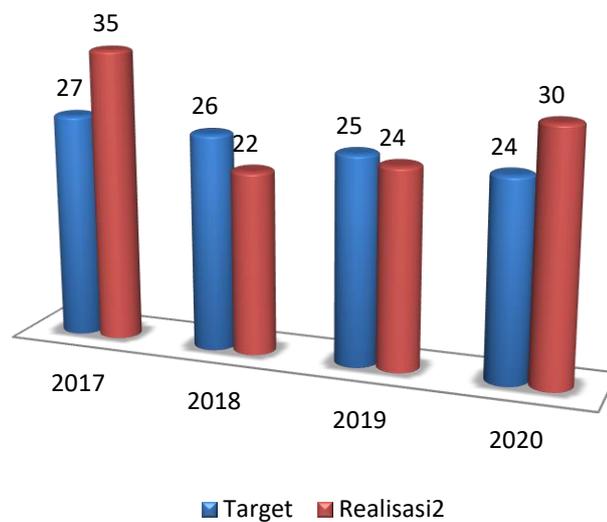
Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Seluruh puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terakreditasi, hal ini dilakukan agar puskesmas semakin memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjamin perbaikan mutu.

Selain itu terdapat pula indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum mencapai target yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah kematian ibu

- b. Angka Kematian Bayi
- c. Prevalensi Kurang Gizi pada balita
- d. Cakupan penerapan zona integritas
- e. Cakupan penerapan kawasan birokrasi bebas korupsi
- f. Kualitas sanitasi dasar
- g. Cakupan Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) .
- h. Cakupan desa siaga aktif

Gambar 2.2
Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020



Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Kutai Kartanegara disebabkan oleh masih belum optimalnya cakupan dan kualitas antenatal care, persalinan di Fasyankes, sistem dan penunjang rujukan, penanganan PTM (Hipertensi dalam kehamilan), dan belum sinerginya antar fasyankes baik secara vertikal maupun horizontal, serta kompetensi petugas kesehatan dalam mengenali risiko (3T) yang masih kurang baik.

Selain tingginya AKI, angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal disebabkan oleh masih tingginya kasus komplikasi selama persalinan dan ibu hami KEK (Kurang energi Kronis), rendahnya cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), belum maksimalnya sistem rujukan, serta kurangnya kompetensi tenaga kesehatan.

Gambar 2.3
 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020



Rendahnya status gizi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara disebabkan karena masih belum optimalnya penanganan gizi pada ibu hamil. Masih rendahnya cakupan ASI eksklusif, cakupan bayi baru lahir mendapat IMD, dan cakupan bayi mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) juga menjadi penyebab rendahnya status gizi masyarakat. Selain itu rendahnya kualitas kesehatan lingkungan terutama air baersih dan jamban juga mempengaruhi status gizi masyarakat.

Gambar 2.4
 Prevalensi Kurang Gizi pada Balita
 di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020



Masih rendahnya capaian indikator kinerja terkait kualitas sanitasi dasar dan Cakupan Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya cakupan desa/kelurahan SBS ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang PHBS, masalah ekonomi dan kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara dimana masih banyak terdapat rumah yang dibangun di atas bantaran sungai.

Gambar 2.5
Cakupan Rumah Tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2020



Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Kutai Kartanegara

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	27.911.63 6.602,05	32.974.0 00.000,0 0	36.162.385.3 00,00	43.767.191 .762,71		26.365.917 .950,00	27.820.097 .165,00	28.565.475 .482,00	37.068.487.9 36,00		0,9	0,8	0,8	0,8		3.963.888. 790,17	2.675.642. 496,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.810.743 .711,58	1.677.44 6.274,00	6.088.283. 835,00	8.381.484. 300,00		146.711.00 0,00	568.814.96 4,00	4.740.319. 510,00	7.169.028.74 8,00		0,0	0,3	0,8	0,9		1.142.685. 147,11	1.755.579. 437,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	60.000.0 00,00	406.000.00 0,00	147.543.00 0,00		-	-	40.105.000 ,00	74.449.700,0 0		#DIV/ 0!	0,0	0,1	0,5		36.885.750 ,00	18.612.425 ,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.00 0,00	275.000. 000,00	2.308.650. 000,00	1.300.000. 000,00		58.074.400 ,00	102.340.00 0,00	711.290.93 8,00	334.997.550, 00		0,8	0,4	0,3	0,3		306.250.00 0,00	69.230.787 ,50
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.098.624 .635,24	48.620.9 14.153,5 0	8.239.892. 414,00	4.690.214. 190,85		8.666.624. 634,00	46.477.644 .624,00	5.910.080. 110,00	2.899.627.13 0,00		1,0	1,0	0,7	0,6		1.102.102. 611,10	1.441.749. 376,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.316.657 .000,00	5.610.78 4.000,00	8.383.205. 000,00	17.282.748 .959,00		1.297.149. 975,00	1.412.044. 630,00	5.667.992. 943,00	9.815.511.72 6,00		0,3	0,3	0,7	0,6		3.241.522. 989,75	2.129.590. 437,75
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	27.246.54 7.000,00	34.601.2 88.000,0 0	42.864.937 .059,00	49.453.984 .600,00		16.369.383 .926,00	28.014.002 .815,00	33.428.363 .630,00	32.780.644.6 99,00		0,6	0,8	0,8	0,7		5.551.859. 400,00	4.102.815. 193,25

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengawasan Obat dan Makanan	100.000.000,00	150.000.000,00	550.000.000,00	529.507.400,00		10.605.000,00	70.742.000,00	387.633.300,00	322.484.400,00		0,1	0,5	0,7	0,6		107.376.850,00	77.969.850,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	375.000.000,00	450.000.000,00	1.524.190.000,00	868.772.800,00		132.225.000,00	264.797.500,00	1.147.668.811,00	526.820.300,00		0,4	0,6	0,8	0,6		123.443.200,00	98.648.825,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.000.000.000,00	1.545.000.000,00	3.559.856.225,00	3.678.713.600,00		315.946.767,00	259.326.759,00	2.561.507.784,00	2.185.667.700,00		0,3	0,2	0,7	0,6		669.678.400,00	467.430.233,25
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.530.000.000,00	358.000.000,00	600.000.000,00	3.641.483.886,00		826.536.940,00	184.164.831,00	450.400.800,00	2.467.402.800,00		0,5	0,5	0,8	0,7		527.870.971,50	410.216.465,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	850.000.000,00	450.000.000,00	1.211.085.000,00	8.698.785.651,00		198.026.365,00	176.199.540,00	694.642.198,00	4.642.666.866,00		0,2	0,4	0,6	0,5		1.962.196.412,75	1.111.160.125,25
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3.651.548.000,00	2.440.270.000,00	5.148.650.000,00	4.052.915.000,00		2.754.058.683,00	1.607.895.719,00	3.013.217.183,00	532.690.500,00		0,8	0,7	0,6	0,1		100.341.750,00	555.342.045,75
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	19.870.833.300,00	79.406.937.950,00	50.445.725.409,00	52.303.711.713,00		5.068.247.688,00	48.219.757.590,00	42.037.027.172,00	34.853.166.733,00		0,3	0,6	0,8	0,7		8.108.219.603,25	7.446.229.761,25
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	78.091.469.438,17	8.704.123.000,00	29.684.628.000,00	34.788.882.195,00		51.960.326.976,00	4.771.414.168,00	27.365.632.897,00	32.492.442.695,00		0,7	0,5	0,9	0,9		10.825.646.810,79	4.866.971.070,25

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	-		-	58.964.300,00	78.568.150,00	-		0,0	0,6	0,5	#DIV/0!		-25.000.000,00	-
Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans	450.000.000,00	400.000.000,00	2.474.688.000,00	583.585.549,00		48.118.100,00	109.103.621,00	1.114.269.028,00	400.731.519,00		0,1	0,3	0,5	0,7		33.396.387,25	88.153.354,75
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	200.000.000,00	250.000.000,00	4.918.380.000,00	2.032.052.800,00		69.272.800,00	123.050.699,00	4.341.081.730,00	1.807.170.789,00		0,3	0,5	0,9	0,9		458.013.200,00	434.474.497,25
Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana/Wabah	400.000.000,00	300.000.000,00	1.092.630.866,00	469.089.000,00		46.354.000,00	75.367.800,00	698.132.506,00	217.103.750,00		0,1	0,3	0,6	0,5		17.272.250,00	42.687.437,50
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	8.058.622.000,00	8.234.671.000,00	7.997.000.000,00	4.587.329.180,00		1.450.696.100,00	3.714.904.520,00	3.187.663.933,00	2.228.736.480,00		0,2	0,5	0,4	0,5		-867.823.205,00	194.510.095,00
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	250.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	-		-	173.868.000,00	57.474.000,00	-		0,0	0,4	0,4	#DIV/0!		-62.500.000,00	-
Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	455.000.000,00	614.760.000,00	962.760.000,00	3.026.349.000,00		143.096.280,00	231.167.900,00	658.902.951,00	2.106.828.318,00		0,3	0,4	0,7	0,7		642.837.250,00	490.933.009,50
Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD				39.931.195.965,09					-							7.116.026.680	

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					58.964.461.451,40											58.964.461.451,40	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat					121.105.471.350,00											121.105.471.350,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					967.360.000,00											967.360.000,00	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					183.691.000,00											183.691.000,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					658.814.400,00											658.814.400,00	
TOTAL	187.841.681.687,04	227.673.194.377,50	214.922.947.108,00	284.215.540.551,65	181.879.798.201,40	115.927.372.584,00	164.435.669.145,00	166.857.450.056,00	174.926.660.339,00								
							164.435.669.181,00										

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya dinamika perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan. Dinamika perubahan tersebut antara lain perubahan atau kemajuan teknologi, dinamika perkembangan regional dan global, perubahan sistem dan tatanan kehidupan, perubahan sosial-ekonomi dan budaya, perubahan tingkat ekspektasi masyarakat, dan lain-lain.

2.4.1. Tantangan

1. Derajat Kesehatan (Status Kesehatan Masyarakat)
 - a. Penurunan Angka Kematian Ibu, bayi dan Balita yang masih belum optimal.
 - b. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
 - c. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh, terutama stunting.
 - d. Disparitas antar wilayah, golongan pendapatan, dan urban-rural masih terjadi dan belum terjadi perbaikan secara signifikan. Sehingga perlu pendekatan pembangunan sesuai kondisi wilayah.
 - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dalam lingkungan yang sehat dan berPHBS.
2. Sumber Daya Kesehatan
 - a. Perlunya peningkatan upaya ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem penjaminan pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada saat ini sudah dilaksanakan melalui program Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat.
 - b. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan secara lebih baik

- c. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti: penduduk miskin, lansia, dan masyarakat marginal lainnya.
 - d. Belum meratanya jumlah, jenis, kualitas, serta pendistribusian sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
 - e. Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi kesehatan.
 - f. Terbatasnya ketersediaan aset berupa lahan/tanah untuk pengembangan bangunan sarana kesehatan.
 - g. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan tingkat Puskesmas, belum memenuhi syarat baik standar bangunan maupun sarana pendukungnya.
 - h. Kurang optimalnya sistem manajemen dan regulasi kesehatan.
3. Sistem Informasi Kesehatan
- a. Belum optimalnya pendataan kesehatan yang cepat, akurat dan valid yang berakibat terlambatnya penetapan kebijakan dan intervensi, untuk menunjang Program Indonesia Sehat dan pendekatan Keluarga (PIS-PK)
 - b. Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi secara menyeluruh
4. Dukungan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor
- a. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor.
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal, termasuk pembudayaan Germas.

2.4.2. Peluang

1. Sumber Daya Kesehatan
- a. Jumlah SDM yang banyak merupakan peluang untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan kesehatan dengan meningkatkan kompetensinya dan realokasi distribusi SDM sehingga bias memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

- b. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah terakreditasi merupakan peluang dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan dan pembangunan kesehatan.
 - c. Sumber dana pembiayaan kesehatan yang tidak hanya bersumber dari APBD tetapi juga dari APBD Provinsi dan APBN, merupakan peluang dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan dan pembangunan kesehatan.
2. Sistem Informasi Kesehatan
- Sistem informasi kesehatan yang berjenjang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan sampai ke tingkat Pusat yang berbasis Website.
3. Dukungan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor
- a. Tingginya komitmen Pemerintah Daerah terhadap pembangunan kesehatan dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan terkait kesehatan. Kebijakan yang sudah dilakukan antara lain memenuhi kebutuhan anggaran kesehatan dan melaksanakan program jaminan kesehatan daerah.
 - b. Keberadaan stakeholder seperti fasilitas pelayanan kesehatan swasta, tokoh masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan, perguruan tinggi, media massa/pers, dunia usaha dan organisasi perangkat daerah lainnya merupakan peluang yang potensial untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan melalui penggerakan dan pemberdayaan seluruh stakeholder yang ada.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa permasalahan antara lain:

a. Masih rendahnya derajat kesehatan

1. Tingginya Angka Kematian Ibu

Masih tingginya angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Kutai Kartanegara disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih belum optimalnya cakupan dan kualitas antenatal care, persalinan di Fasyankes, sistem dan penunjang rujukan, penanganan PTM (Hipertensi dalam kehamilan), dan belum sinerginya antar fasyankes baik secara vertikal maupun horizontal, serta kompetensi petugas kesehatan dalam mengenali risiko (3T) yang masih kurang baik.

2. Tingginya Angka kematian Bayi

Tingginya angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Kutai Kartanegara disebabkan oleh masih tingginya kasus komplikasi selama persalinan dan ibu hamil KEK (Kurang energi Kronis), rendahnya cakupan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), belum maksimalnya sistem rujukan, serta kurangnya kompetensi tenaga kesehatan.

3. Rendahnya Status Gizi Masyarakat terutama Gizi Lebih dan Gizi Kurang

Rendahnya status gizi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara disebabkan karena masih belum optimalnya penanganan gizi pada ibu hamil. Masih rendahnya cakupan ASI eksklusif, cakupan bayi baru lahir mendapat IMD, dan cakupan bayi mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) juga menjadi penyebab rendahnya status gizi

masyarakat. Selain itu rendahnya kualitas kesehatan lingkungan terutama air bersih dan jamban juga mempengaruhi status gizi masyarakat.

4. Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit

Belum tertanganinya faktor risiko penyakit yaitu Lingkungan (Penyakit menular: TB; Penyakit Perencanaan: Diare), Perilaku seksual menyimpang: HIV AIDS, Penyalahgunaan Nafza Suntik, HIV AIDS, Hepatitis B, Merokok: PTM (DM, Hipertensi, Penyakit Paru, Keganasan), Pola Makan: Penyakit Tidak Menular, Kepatuhan: PD31 (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) menjadi penyebab belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit.

Selain itu kurangnya deteksi dini, kurang optimalnya penanganan dan kompetensi petugas kesehatan, masih rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan pemerintah/lintas sektor serta kurangnya upaya promotif dan preventif juga menjadi penyebab belum optimalnya pencegahan dan pengendalian penyakit di Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Masih kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya

Sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu belum terpenuhinya IPAL di setiap puskesmas, ambulance di setiap puskesmas yang sesuai standar, masih belum cukupnya daya listrik di setiap puskesmas, masih belum cukupnya meubelair di setiap puskesmas, belum terpenuhinya sarana air bersih di setiap puskesmas, belum terpenuhinya sarana TPS di setiap puskesmas, dan belum terpenuhinya bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang sesuai standar, serta Rumah Dinas Tenaga kesehatan di setiap puskesmas.

Selain itu belum optimalnya perencanaan pemenuhan kebutuhan sarana, kurangnya sumber daya manusia baik jumlah maupun kemampuan/kompetensi serta anggaran yang masih belum sesuai

dengan kebutuhan juga menjadi penyebab kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana di puskesmas dan jaringannya

6. Belum tercukupinya kebutuhan obat, vaksin dan bahan medis habis pakai

Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya kebutuhan obat, vaksin dan BMHP, belum optimalnya perencanaan kebutuhan obat, vaksin, dan BMHP (data tidak akurat), kurangnya kemampuan petugas di puskesmas dalam pengelolaan sediaan farmasi, kurangnya kepatuhan petugas dalam pencatatan dan pelaporan, kurangnya kemampuan penyedia dalam menyediakan obat, vaksin dan BMHP yang dibutuhkan serta belum optimalnya sistem pengadaan E-Katalog dan Masih tersentralisasinya pengadaan vaksin.

7. Masih kurangnya pemenuhan alat kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu

Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya pengadaan alkes, belum akuratnya data inventaris alat kesehatan, kurangnya kemampuan petugas pengelola alat kesehatan di puskesmas, kurangnya pemeliharaan alat kesehatan, distribusi alat kesehatan tidak tepat sasaran dan anggaran masih belum sesuai dengan kebutuhan.

8. Pengelolaan sistem informasi kesehatan di puskesmas belum optimal yang disebabkan oleh masih kurangnya perangkat dan jaringan (sebagian), serta kemampuan petugas operasional dan SDM IT.

9. Masih beredarnya sediaan farmasi, makanan minuman yang TMS (Tidak Memenuhi Syarat) dikarenakan masih kurangnya tenaga pengawas serta kurangnya kemampuan petugas pengawas (DFI/PKP).

10. IKS Kutai Kartanegara masuk kategori : TIDAK SEHAT (0,21)

Penyebab IKS Kartanegara masuk kategori : TIDAK SEHAT yaitu kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga memerlukan sumber daya yang berbeda dengan perkotaan, dan

kondisi jaringan komunikasi data yang memperlambat penginputan data di aplikasi dan berakibat menumpuknya data yang belum diinput.

Terbatasnya SDM Puskesmas yang melakukan pendataan, dimana satu orang dapat merangkap beberapa program sehingga sulit fokus pada satu program. Ditambah lagi dengan banyaknya program-program dari pusat yang dibebankan kepada puskesmas dengan SDM terbatas. Idealnya dibutuhkan satu tim khusus yang benar-benar fokus pada program PISPK ini.

Sarana dan prasarana pendataan masih kurang (laptop/komputer dipakai untuk beberapa program dan kegiatan juga android untuk penginputan data). Selain itu Adanya Pandemi COVID-19 sehingga kegiatan pendataan dan intervensi lanjut tidak bisa dilakukan / tertunda.

11. Mutu Pelayanan Kesehatan belum optimal

12. Pandemi COVID-19 yang memberikan dampaknegatif pada derajat kesehatan masyarakat, tentu penanganan danpemulihannya menjadi salah satu prioritas utama pembangunan.

b. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Belum Mengakomodir Seluruh Penduduk Kukar

1. Belum optimalnya pematkhiran Data Penduduk yang didaftarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (PD Pemkab Kukar) terkait perubahan status kependudukan serta perubahan status kesejahteraan. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pendataan status kependudukan dan pematkhiran data perubahan status kesejahteraan di tingkat RT/Desa/Kelurahan.

2. Masih banyak penduduk yang seharusnya masuk dalam DTKS namun belum terdata. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki Dokumen Kependudukan (KK dan KTP). Selain itu masyarakat yang tidak memiliki KK/KTP baru mau mengurus dokumen kependudukan pada saat sedang sakit.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”**. Visi tersebut didasari pada upaya pencapaian pembangunan daerah yang inklusif, yang dilakukan dengan mengoptimalkan segenap sumber daya yang dimiliki (potensi daerah) didasarkan atas prinsip keterpaduan antara pendekatan sektoral dan kewilayahan. Untuk mewujudkan visi maka diperlukan serangkaian misi. Dengan melihat fokus dan peta permasalahan dan isu strategis serta amanat misi dalam RPJMD maka arah misi pembangunan 2021-2026 adalah:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Dari misi RPJMD diatas, Dinas Kesehatan berhubungan dengan misi kedua

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek

pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (human capital).

Dalam mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka *stunting* pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan

7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu dari penyelenggaraan pembangunan kesehatan mempunyai visi : **“Meningkatkan Derajat dan Mutu Kesehatan Masyarakat Kalimantan Timur yang Merata dan Berkeadilan”**.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Menjamin pemeliharaan dan peningkatan upaya kesehatan yang bermutu, terjangkau dan berkeadilan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan membangun kemitraan dengan lintas sektor.
3. Menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan yang memadai dan berkesinambungan.

Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah. Tujuan pembangunan kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu **“Meningkatkan Kesehatan dan Gizi Masyarakat”**.

Untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dirumuskan sasaran untuk meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Meningkatnya status kesehatan Ibu dan Anak.
- b. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar.
- c. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administratif, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang kesehatan menjadi satu diantara ujung tombak penciptaan *blue economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

3.4.1. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudiandiperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh

rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Untuk mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)* menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (RTRW) disusun pada Tahun 2013 dan berlaku sampai dengan tahun 2033 (20 tahun, sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang), dan ditetapkan menjadi Perda No. 9 Tahun 2013.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Rencana struktur ruang Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri:

- a. Rencana sistem prasarana utama yang terdiri dari rencana jaringan transportasi darat, rencana jaringan perkeretaapian, rencana jaringan transportasi laut dan rencana jaringan transportasi udara,
- b. Rencana jaringan prasarana sumber daya air, meliputi: Sistem wilayah sungai, sistem jaringan irigasi, sistem pengelolaan air baku, sistem air bersih ke kelompok pengguna dan sistem pengendalian banjir.
- c. Rencana jaringan pengelolaan lingkungan, meliputi : sistem jaringan persampahan, sistem jaringan air minum, sistem jaringan air limbah, system jaringan drainase, jalur dan ruang evakuasi bencana alam.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program.

Kabupaten Kutai Kartanegara terletak di Propinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah daratan 27.263,10 km², sedangkan luas wilayah perairan ±4.097 km². Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada posisiantara 115° 26'28" - 117°36'43" BT dan 1°28'21" LU sampai 1°08'06" LS.

Berdasarkan Kutai Kartanegara dalam Angka Tahun 2011, topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. Daerah kemiringan datar sampai landai dengan ketinggian antara 0-7 m dpl terdapat di beberapa bagian yaitu pada kawasan pantai dan sebagian besar Daerah Aliran Sungai Mahakam. Sedangkan wilayah yang tergolong ke dalam kelas ketinggian 7-25 m memiliki sifat berupa permukaan tanah datar sampai landai, kadang tergenang, kandungan air tanah cukup baik, dapat diairi dan tidak ada erosi, sehingga sangat cocok untuk pertanian lahan basah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil review capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kajian Renstra Kementerian Kesehatan, kajian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan kajian RTRW dan KLHS, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

a. Derajat Kesehatan Yang Belum Optimal

▪ Jumlah Kematian Ibu

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Kutai Kartanegara selama lima tahun terakhir (2016-2021) berfluktuasi dan cenderung

mengalami peningkatan yang cukup tajam, khususnya pada Tahun 2017 dengan 35 kematian dan Tahun 2020 dengan 30 kematian. Namun mengalami penurunan menjadi 22 kematian pada Tahun 2018.

Kematian ibu yang cukup tinggi dan jauh melewati target Renstra Dinas Kesehatan disebabkan oleh perdarahan, eklamsi dan infeksi sebagai penyebab langsung, namun yang harus diwaspadai adalah meningkatnya jumlah kematian karena penyakit tidak menular yang dialami oleh ibu hamil dan bersalin. Kematian juga didominasi oleh ibu usia produktif (20-30tahun) dan juga tinggi pada ibu dengan paritas antara 1-3, begitu pun tempat terjadinya kematian yang jauh lebih tinggi di RS dibanding dengan dipuskesmas atau pun di rumah. Pergeseran penyebab kematian yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara disebabkan karena lemahnya pengelolaan pada determinan antara maupun determinan jauh dari penyebab kematian ibu. Faktor 3 (tiga)terlambat juga masih menjadi penyebab utama. Pelayanan kesehatan yang kurang berkualitas juga menjadi salah satu alasan tingginya kematian ibu karena cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil Tahun 2020 cukup tinggi, seperti K1(115%), K4(90%), TTD (97,6%), Linakes (108%), LinFaskes(104%), KN1 (98,1%), KN3L(91%), dan Vitamin A bufas (108%). Dan yang paling penting adalah kurangnya kerjasama lintas program dan lintas sektor.

- **Angka Kematian Bayi**

Kematian bayi di Kabupaten Kutai Kartanegara juga masih tergolong tinggi dan cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020). Jumlah kematian bayi di Tahun 2020 sebanyak 116 kasus atau 186 pada Angka Kematian Bayi, yang mana jauh lebih tinggi dari target Angka Kematian Bayi pada Renstra Dinas Kesehatan yaitu 146.

Penyebab kematian bayi karena BBLR, asfiksia, kelainan congenital dan lain-lain, tidak terlepas dari riwayat kesehatan ibunya selama hamil. Kualitas kehamilan seorang ibu sangat

menentukan kualitas janinyang dikandungnya. Begitu pun pemilihan pelayanan kesehatan mulai hamil hingga bersalin dan nifas, sangat menentukan kesehatan dan keselamatan bayinya.Oleh karena itu, faktor pengetahuan ibu, faktor gizi, kesehatan lingkungan, kualitas pelayanan kesehatan dan faktor pendukung lainnya menjadi penting dalam upaya menurunkan kematian bayi.

- Morbiditas (kesakitan) pada Penyakit

Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) cukup memprihatinkan dengan beban ganda penyakit. Saat penyakit menular masih tinggi, di saatyang sama penyakit tidak menular juga semakin meningkat. Hal ini terjadi karena kondisi lingkungan yang belum kondusif untuk hidup sehat, disertai dengan perilaku hidup masyarakat yang tidak sehat. Bahkan beberapa kasus kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, bukan disebabkan oleh kehamilannya, tetapi akibat penyakit tidak menular yang dideritanya, seperti Penyakit Jantung, Diabetes Mellitus dan Hipertensi.

Hasil review capaian indikator kinerja untuk Program Pengendalian Penyakit menunjukkan bahwa Angka kesembuhan penderita penyakit TB Paru BTA(+) sudah sesuai target, tetapi upaya penemuan kasusbaru penderita TB Paru BTA(+) masih belum mencapai SPM Bidang Kesehatan.Hal ini berarti upaya pemberantasan penyakit Tuberkulosis (TB) Paru masih belum optimal. Sedangkan penyakit HIV/AIDS menunjukkan trend peningkatan kasus baik untuk HIV maupun AIDS. Sementara Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) atau *Dengue Haemorrhagic Fever* (DHF) yang merupakan salah satu penyakit menular yang sampai saat ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, kejadian dan kasus kematiannya menunjukkan trend yang meningkat dan fluktuatif, walaupun sudah mencapai target indikator kinerja SPM Bidang Kesehatan.

- Status Gizi

Kondisi kurang gizi pada Balita di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) berfluktuasi dan cenderung menurun. Prevalensi kurang gizi pada balita menunjukkan angka 10,6%, menurun dari tahun 2019 (14,26%), telah memenuhi target Renstra Dinas Kesehatan (16%), bahkan melebihi target nasional < 22 %. Sementara Stunting pada Balita, yang merupakan dampak dari kurang gizi masa lalu juga tinggi, sebesar 14,1%.

- b. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang belum optimal

Sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki banyak permasalahan. Ketersediaan sarana prasarana yang masih kurang. Selain itu bahan penunjang pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium dan gigi masih sangat kurang dan sarana transportasi khusus untuk daerah tertentu juga masih kurang

- c. Komitmen Global dan Nasional dan Daerah pada bidang kesehatan

- *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari *Milenium Development Goals (MDGs)*. SDGs berisi 17 tujuan transformative yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali dan terdapat 3 tujuan yang sangat terkait dengan kesehatan yaitu:

Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, termasuk di dalamnya mengatasi Giziburuk.

Tujuan 3: Kesehatan untuk semua lapisan penduduk (usia).

Tujuan 6: Ketersediaan air bersih dan sanitasi.

Saat ini Indonesia ternyata belum berhasil menurunkan angka kematian ibu, akses kepada sanitasi dan air minum, dan penurunan prevalensi AIDS dan HIV, oleh karena itu SDGs menjadi suatu yang penting dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- *Asean Economic Community (AEC)*

Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) menjadi isu penting dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara karena tidak dipungkiri bahwa dengan adanya kebijakan pasar bebas ini, maka pasti akan berdampak pada pelaksanaan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada, akan bersaing dengan tenaga kesehatan asing yang mungkin kualitasnya lebih tinggi dari tenaga kesehatan kita, begitu pun hal lainnya yang terkait dengan pelayanan kesehatan.

▪ KUKAR IDAMAN

Secara Umum Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang Kesehatan yang tertuang dalam Visi-Misi Bupati dan Program KUKAR IDAMAN sangat mendukung pembangunan kesehatan dan juga sangat berkesesuaian dengan Kebijakan Pemerintah dan Pemprov, baik aspek tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program strategis.

d. Sumber Daya Kesehatan yang masih kurang

Sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menjadi masalah karena belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan spesifik seperti dokter, dokter gigi, tenaga kefarmasian/apoteker, tenaga ahli gizi (nutrisionis), tenaga ahli sanitasi (sanitarian), tenaga laboratorium (analisis kesehatan) dan lainnya. Persoalan berikutnya adalah distribusi tenaga tertentu yang kurang merata, tidak bersedia ditugaskan ke wilayah yang jauh dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Penyebab ketiga adalah tenaga yang tersedia, sebagian besar berstatus Tenaga Harian Lepas (THL), yang mempunyai hak berbeda dengan PNS, mereka diberi kewenangan terbatas padahal pada beberapa puskesmas, khususnya di wilayah-wilayah terpencil, justru THL inilah yang menjadi penanggung jawab program. Selain itu, kompetensi tenaga dan juga kualitas SDM kesehatan masih kurang.

e. Peran serta stakholder pada bidang kesehatan

Faktor terbesar kedua setelah lingkungan, yang berpengaruh dalam status kesehatan masyarakat adalah perilaku. Perilaku positif terhadap

kesehatan akan membuat seorang individu atau kelompok untuk ikut berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Persentase Rumah Tangga (RT) yang melaksanakan PHBS masih sangat rendah karena masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan sehingga promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Posyandu dan Poskesdes sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat(UKBM) belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat dan upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat terutama penyakit-penyakit yang berpotensi wabah seperti DBD.

f. Kinerja dan akuntabilitas serta reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur negara yang profesional, sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (*mind-set*) dan pola budaya (*culture-set*) pegawai negeri dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

g. Peningkatan pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular

h. Jaminan Kesehatan Daerah (Total Coverage)

i. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

j. Pandemi Covid dan pasca pandemi

k. Pencegahan Stunting

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara menindak lanjuti perwujudan visi dan misi tersebut sebagaimana terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026.

Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2021-2026 yang menjadi perwujudan Dinas Kesehatan 2021-2026 dalam mencapai visi adalah :

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya

Langkah-langkah yang diambil dalam penjabaran pelaksanaan Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan “Tujuan Renstra” untuk pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan dengan mengambil sasaran pelaksanaan yang menjadi kewenangannya dalam RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara:

“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”

Untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, diambil beberapa sasaran untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, diantaranya adalah :

Sasaran :

1. Menurunnya Angka Kematian Bayi
2. Menurunnya Angka Kematian Ibu
3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)
4. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis(Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan strategi dan kebijakan. Strategi digunakan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya bidang Kesehatan dan kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.

TabelT-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realisasi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT		Usia Harapan Hidup	Tahun	72,34	71,79	72,78	73	73,22	73,44	73,66	73,66
		1. Menurunnya Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	Angka		15	13	13	13	12	12	12
		2. Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka		233	215	208	201	193	186	186
		3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	Indeks	0	0	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,72
		4. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	75	90	80	82,5	85	87,5	90	90

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya oleh Dinas Kesehatan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan, dan berdasarkan Visi KUKAR IDAMAN, maka salah satu agenda prioritas pembangunan yang terkait dengan bidang kesehatan adalah menitik beratkan pada misi kedua yaitu **“Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya”**, difokuskan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sehat, berpendidikan, terampil, berakhlak dan berperilaku mulia dengan sasaran meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 akan dikembangkan strategi sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Pengawasan Makanan Minuman
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesehatan

5. Meningkatkan fungsi Tata Kelola Bidang Kesehatan

5.2 Arah Kebijakan

Adapun kebijakan yang diterapkan meliputi:

1. Pengembangan Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
3. Peningkatan Layanan Perizinan Rumah Sakit Tipe C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
4. Meningkatkan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
5. Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
6. Meningkatkan Pemberdayaan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor
7. Meningkatkan tatakelola administrasi untuk menunjang kualitas pelayanan bidang kesehatan.

Untuk lebih jelasnya, strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Renstra lima tahun kedepan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD)	: “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”		
MISI 2 (RPJMD)*	: “Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya”		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Menurunnya Angka Kematian Bayi	Pemenuhan Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
	Menurunnya Angka Kematian Ibu		Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)		Peningkatan Layanan Perizinan Rumah Sakit Tipe C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatkan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
		Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Pengawasan Makanan Minuman	Menyelenggarakan Pelayanan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesehatan	Meningkatkan Pemberdayaan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Peningkatan Fungsi Tata Kelola Bidang Kesehatan		Meningkatkan tata kelola administrasi untuk menunjang kualitas pelayanan bidang kesehatan	

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan berikut indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026).

Tabel T-C 27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
		1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					317.501.132.703		331.372.153.116		331.247.153.116		331.247.153.116		331.372.153.116		1.642.739.745.167	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	78,50	187.080.452.704	79	198.184.403.116	79,5	198.059.403.116	80	198.059.403.116	80,01	198.184.403.116	80,01	979.568.065.168	Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	836.020.000	4	1.200.000.000	4	1.200.000.000	4	1.200.000.000	4	1.200.000.000	4	5.636.020.000	Sekretariat	Kab. Kukar
		1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	442.534.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	2.442.534.000	Subbag. Sungram dan Keu.	Kab. Kukar
		1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	393.486.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	350.000.000	2	1.793.486.000	Subbag. Sungram dan Keu.	Kab. Kukar
		1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	2	-	-	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	350.000.000	4	1.400.000.000	Subbag. Sungram dan Keu.	Kab. Kukar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	4	4	101.066.160.685	4	101.066.160.586	4	101.066.160.586	4	101.066.160.586	4	101.066.160.586	4	505.330.803.029	Sekretariat	Kab. Kukar
		1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan		12	99.506.512.545	12	99.506.512.446	12	99.506.512.446	12	99.506.512.446	12	99.506.512.446	12	497.532.562.329	Subbag. Sungram dan Keu.	Kab. Kukar
		1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	2.250.000.000	Subbag. Sungram dan Keu.	Kab. Kukar
		1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Semesteran SKPD	laporan	12	12	1.109.648.140	12	1.109.648.140	12	1.109.648.140	12	1.109.648.140	12	1.109.648.140	12	5.548.240.700	Subbag. Sungram dan Keu.	Kab. Kukar
		1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	244.440.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	1.244.440.000	Sekretariat	Kab. Kukar
		1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	laporan	1	1	44.440.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	244.440.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	laporan	16	16	200.000.000	16	200.000.000	16	200.000.000	16	200.000.000	16	200.000.000	16	1.000.000.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	3	2.042.500.000	3	2.225.000.000	3	2.100.000.000	3	2.100.000.000	3	2.225.000.000	3	10.692.500.000	Sekretariat	Kab. Kukar
		1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan	unit	1	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	500.000.000	Subbag. Kepegawaian	Kab. Kukar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Stel	0	500	125.000.000	500	125.000.000	500	0	0	0	0	125.000.000	1500	375.000.000	Subbag. Kepegawaian	Kab. Kukar
		1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	Laporan		12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	1.000.000.000	Subbag. Kepegawaian	Kab. Kukar
		1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	unit		34	200.000.000	34	200.000.000	34	200.000.000	34	200.000.000	34	200.000.000	34	1.000.000.000	Subbag. Kepegawaian	Kab. Kukar
		1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	laporan		34	200.000.000	34	200.000.000	34	200.000.000	34	200.000.000	34	200.000.000	34	1.000.000.000	Subbag. Kepegawaian	Kab. Kukar
		1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang		200	800.000.000	200	800.000.000	200	800.000.000	200	800.000.000	200	800.000.000	200	4.000.000.000	Subbag. Kepegawaian	Kab. Kukar
		1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yg mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		50	67.500.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	250	467.500.000	Subbag. Kepegawaian	Kab. Kukar
		1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		50	350.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	50	500.000.000	250	2.350.000.000	Subbag. Kepegawaian	Kab. Kukar
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	layanan		8	2.153.608.500	8	2.760.000.000	8	2.760.000.000	8	2.760.000.000	8	2.760.000.000	8	13.193.608.500	Sekretariat	Kab. Kukar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jenis		12	44.980.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	444.980.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis		12	348.700.500	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	1.148.700.500	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1. Jenis 2. Porsi 3. Kotak		14870	199.995.000	14870	200.000.000	14870	200.000.000	14870	200.000.000	14870	200.000.000	14870	999.995.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1. Buku 2. Lembar 3. Buah		1	150.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	1	1.550.000.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	1. Eksemplar 2. Buku 3. Kali		250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	250	250.000.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Orang/kali		900	45.000.000	900	50.000.000	900	50.000.000	900	50.000.000	900	50.000.000	900	245.000.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Orang/kali		12	1.176.520.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	1.500.000.000	12	7.176.520.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Berkas		32	138.413.000	32	310.000.000	32	310.000.000	32	310.000.000	32	310.000.000	32	1.378.413.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang diadakan	unit		22	1.299.784.100	22	1.425.000.000	22	1.425.000.000	22	1.425.000.000	22	1.425.000.000	110	6.999.784.100	Sekretariat	Kab. Kukar
		1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	unit		15	450.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	150.000.000	15	1.050.000.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	unit			5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	5	1.600.000.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar	
		1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	paket		1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	350.000.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta lokasi tanah yang disediakan	paket		1	799.784.100	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	3.999.784.100	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	12	38.069.206.852	12	33.655.000.000	12	33.655.000.000	12	33.655.000.000	12	33.655.000.000	12	172.689.206.852	Sekretariat	Kab. Kukar
		1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	bulan		12	2.992.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	22.992.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan		12	2.999.420.412	12	3.500.000.000	12	3.500.000.000	12	3.500.000.000	12	3.500.000.000	12	16.999.420.412	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan		12	67.374.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	667.374.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.Jumlah waktu Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	bulan		12	34.999.420.440	12	30.000.000.000	12	30.000.000.000	12	30.000.000.000	12	30.000.000.000	12	154.999.420.440	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	95	95	882.259.450	95	1.245.749.000	95	1.245.749.000	95	1.245.749.000	95	1.245.749.000	95	5.865.255.450	Sekretariat	Kab. Kukar
		1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	unit		95	195.000.000	95	250.000.000	95	250.000.000	95	250.000.000	95	250.000.000	95	1.195.000.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit		95	97.491.950	95	150.000.000	95	150.000.000	95	150.000.000	95	150.000.000	95	697.491.950	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Bulan		12	89.833.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	889.833.000	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar
		1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit		3	499.934.500	3	645.749.000	3	645.749.000	3	645.749.000	3	645.749.000	3	3.082.930.500	Subbag. Umum dan Ketatalaksanaan	Kab. Kukar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				dipelihara/direhabilitasi																
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	Puskesmas	18	22	40.486.473.117	24	54.357.493.530	27	54.357.493.530	30	54.357.493.530	32	54.357.493.530	32	257.916.447.237	UPTD . Puskesmas	Kab. Kukar
		1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah masyarakat di wilayah kerja puskesmas BLUD yang dilayani	orang	741.950	764.209	40.486.473.117	787.135	54.357.493.530	8107.49	54.357.493.530	835.071	54.357.493.530	860.123	54.357.493.530	860.123	257.916.447.237	UPTD . Puskesmas	Kab. Kukar
	Menurunnya Angka Kematian Ibu	1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					128.680.929.999		130.422.250.000		130.422.250.000		130.422.250.000		130.422.250.000		650.369.929.999	Bid. Yankes, Kesmas, P2PL, SDK dan UPTD	Kab. Kukar
	Menurunnya Angka Kematian Bayi																			
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)																			
				Presentasi Balita Stunting	Persen	16,19	15,6		15,1		14,6		14,1		13,8		13,8			
				Indeks Keluarga sehat	Persen	0,21	0,25		0,30		0,35		0,40		0,50		0,50			
				Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	Persen	0,72	0,73		0,74		0,75		0,76		0,77		0,77			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Indeks Pelayanan kesehatan balita	Persen	0,73	0,74		0,75		0,76		0,77		0,78		0,78			
				Indeks Pelayanan Penyakit menular	Persen	0,55	0,57		0,59		0,61		0,63		0,65		0,65			
				Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	Persen	0,44	0,46		0,48		0,5		0,52		0,54		0,54			
				Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	Persen	0,85	0,86		0,87		0,88		0,89		0,9		0,9			
				Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	Persen	0,34	0,36		0,38		0,4		0,43		0,45		0,45			
				Indeks Perilaku kesehatan	Persen	0,44	0,45		0,46		0,47		0,48		0,49		0,49			
				Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	Persen	18,75	21,88		25,00		28,13		31,25		34,38		34,38			
		1.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	persen	70	72	35.368.000.000	74	36.300.000.000	76	36.300.000.000	78	36.300.000.000	80	36.300.000.000	80	180.568.000.000	Bidang SDK	
		1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang dibangun	Unit		1		1		1		1		1		1	-	Bidang SDK, Seksi Sarpras	Tersebar
		1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun	Unit				2	10.000.000.000	2	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	6	40.000.000.000	Bidang SDK, Seksi Sarpras	Tersebar
		1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun	Unit	91	8	12.225.000.000	10	4.000.000.000	8	4.000.000.000	8	4.000.000.000	8	4.000.000.000	42	28.225.000.000	Bidang SDK, Seksi Sarpras	Tersebar
		1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	Unit	6	2	1.400.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	6	4.200.000.000	Bidang SDK, Seksi Sarpras	Tersebar
		1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dikembangkan	Unit	0			2	2.000.000.000	3	2.000.000.000	2	2.000.000.000	1	2.000.000.000	8	8.000.000.000	Bidang SDK, Seksi Sarpras	Tersebar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhab dan dipelihara	Unit	6	6	1.600.000.000	6	1.200.000.000	6	1.200.000.000	6	1.200.000.000	5	1.200.000.000	29	6.400.000.000	Bidang SDK, Seksi Sarpras	Tersebar
		1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas pembantu yang direhab dan dipelihara	Unit	9	7	2.100.000.000	10	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	6	1.000.000.000	35	6.100.000.000	Bidang SDK, Seksi Sarpras	Tersebar
		1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang direhab dan dipelihara	Unit	0			3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	12	2.400.000.000	Bidang SDK, Seksi Sarpras	Tersebar
		1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan (Mobil ambulance, meabulair, Ipal, SAP)	Unit	19	1	643.000.000	5	1.000.000.000	24	1.000.000.000	19	1.000.000.000	9	1.000.000.000	58	4.643.000.000	Bidang SDK, Seksi Sarpras	Tersebar
		1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas yang diadakan	Unit	0	43	3.100.000.000	4	2.300.000.000	5	2.300.000.000	2	2.300.000.000	2	2.300.000.000	56	12.300.000.000	Bidang SDK, Seksi Sarpras	Tersebar
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan / alat penunjang medik yang diadakan	Unit	5	5	1.000.000.000	5	2.500.000.000	6	2.500.000.000	8	2.500.000.000	9	2.500.000.000	33	11.000.000.000	Bidang SDK, Seksi Sarpras	Tersebar
		1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara	Unit	0	1	250.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	5	2.250.000.000	UPTD Labkesda	Tersebar
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan vaksin yang diadakan	jenis	250	250	5.400.000.000	250	5.000.000.000	300	5.000.000.000	300	5.000.000.000	300	5.000.000.000	1400	25.400.000.000	Bidang SDK, Seksi Farbekes	Tersebar
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis BHP yang diadakan	jenis	100	100	6.500.000.000	150	4.500.000.000	200	4.500.000.000	250	4.500.000.000	300	4.500.000.000	1000	24.500.000.000	Bidang SDK, Seksi Farbekes	Tersebar
		1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana yang dipelihara	Unit	2	4	900.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	24	2.900.000.000	Bidang SDK, Seksi Farbekes	Tersebar
		1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang dipelihara	paket	1	1	250.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	2.250.000.000	Bidang SDK, Seksi Farbekes	Tersebar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kesehatan																	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan				90.636.929.999		90.446.250.000		90.446.250.000		90.446.250.000		90.446.250.000		452.421.929.999		Bid. Kesmas, P2PL dan Yankes	Kab. Kukar
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan	Persen	96	100		100		100		100		100		100			
				Persentase KB Aktif	Persen	63,00	64		65		66		68		70		70			
				Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	Persen	84,00	93,6		94,1		94,3		94,6		95		95			
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	95	100	5.000.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	15.000.000.000	Bidang Kesmas, Seksi Kesga	Kab. Kukar
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	96	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.000.000.000	Bidang Kesmas, Seksi Kesga	Kab. Kukar
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	91	100	250.000.000	100	256.250.000	100	256.250.000	100	256.250.000	100	256.250.000	100	1.275.000.000	Bidang Kesmas, Seksi Kesga	Kab. Kukar
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Balita	Jumlah Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	48	100	200.000.000	100	205.000.000	100	205.000.000	100	205.000.000	100	205.000.000	100	1.020.000.000	Bidang Kesmas, Seksi Kesga	Kab. Kukar
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan	Persen	99	100	400.000.000	100	410.000.000	100	410.000.000	100	410.000.000	100	410.000.000	100	2.040.000.000	Bidang Kesmas, Seksi	Kab. Kukar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dasar	Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar															Kesga	
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif	Jumlah Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	Persen	34,1	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	3.000.000.000	Bidang P2PL, Seksi P2P	Tersebar
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah sasaran usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Persen	56	100	400.000.000	100	410.000.000	100	410.000.000	100	410.000.000	100	410.000.000	100	2.040.000.000	Bidang Kesmas, Seksi Kesga	Kab. Kukar
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	22,2	100	500.000.000	100	525.000.000	100	525.000.000	100	525.000.000	100	525.000.000	100	2.600.000.000	Bidang P2PL, Seksi P2P	Tersebar
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	82,4	100	500.000.000	100	525.000.000	100	525.000.000	100	525.000.000	100	525.000.000	100	2.600.000.000	Bidang P2PL, Seksi P2P	Tersebar
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Persen	84,2	100	600.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	3.200.000.000	Bidang P2PL, Seksi P2P	Tersebar
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	61,79	100	600.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	3.200.000.000	Bidang P2PL, Seksi P2P	Tersebar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	94,4	100	600.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	3.200.000.000	Bidang P2PL, Seksi P2P	Tersebar	
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah yang ditangani	Persen	100	100	200.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	2.000.000.000	Bidang P2PL, Seksi SIPKLB	Kab. Kukar	
		1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang ditangani	Persen	100	100	150.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.550.000.000	Bidang P2PL, Seksi SIPKLB	Kab. Kukar	
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah petugas gizi yang ditingkatkan kapasitasnya dg kompetensi program perbaikan gizi (TLGB, PMBA, PAGT, PPB)	Persen	25	30 %	600.000.000	50 %	1.500.000.000	60 %	1.500.000.000	80 %	1.500.000.000	100 %	1.500.000.000	100 %	6.600.000.000	Bidang Kesmas, Seksi PGKM	Kab. Kukar	
				Cakupan sasaran yang di input dan divalidasi dalam aplikasi e-PPGBM	Persen	45	60		70		80		90		100		100				
				cakupan ibu hamil yang mendapatkan suplementasi gizi (TTD)	Persen	80	85		90		95		95		100		100				
				cakupan remaja putri yang mendapatkan suplementasi gizi (TTD)	Persen	40	40		45		50		55		60		60				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				cakupan ibu hamil KEK dan balita KEP yang mendapatkan makanan tambahan	Persen	90	95		100		100		100		100		100			
				cakupan ASI eksklusif bayi usia kurang dari 6 bulan. Dan cakupan ASI eksklusif bayi usia 6 bulan	Persen	60	60		60		65		65		70		70			
		1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pelayanan kesehatan dan kebugaran pada anak sekolah, pekerja di sektor formal dan informal	Persen	25	40	75.000.000	50	180.000.000	55	180.000.000	60	180.000.000	65	180.000.000	65	795.000.000	Bidang Kesmas, Seksi PGKM	Kab. Kukar
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa/Kel melaksanakan STBM	Desa	131	14	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	15	500.000.000	74	2.500.000.000	Bidang P2PL, Seksi PL	Tersebar
		1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Tenaga Terlatih pengelola Program Kesehatan Tradisional	orang	0	32	75.000.000	32	175.000.000	32	175.000.000	32	175.000.000	32	175.000.000	32	775.000.000	Bidang Yankes	Kab. Kukar
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persen	84,60%	93,6	336.929.999	94,1	1.000.000.000	94,3	1.000.000.000	94,6	1.000.000.000	95	1.000.000.000	95	4.336.929.999	Bidang P2PL, Seksi SIPKLB	Kab. Kukar
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang dilakukan Pelatihan dan Pembinaan Manajemen	Puskesmas	32	32	350.000.000	32	500.000.000	32	500.000.000	32	500.000.000	32	500.000.000	32	2.350.000.000	Bidang P2PL, Seksi P2P	Kab. Kukar
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah penderita DBD yang ditemukan dan diobati	Persen	100	100	200.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.200.000.000	Bidang P2PL, Seksi P2P	Tersebar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Jumlah penderita pasien Malaria di temukan dan diobati	Persen	75	100		100		100		100		100		100			
				Jumlah penderita pasien Kusta di temukan dan diobati	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
				Jumlah penderita Diare di temukan dan diobati	Persen	28,8	100		100		100		100		100		100			
				Jumlah penderita ISPA/Pneumonia yang ditemukan dan diobati	Persen	115,56	100		100		100		100		100		100			
				Jumlah penderita Hepatitis yang ditemukan dan diobati	Persen	86,68	100		100		100		100		100		100			
				Jumlah penderita Rabies yang ditemukan dan diobati	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
				Jumlah penderita Filariasis dan Cacingan yang ditemukan dan diobati	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
				Jumlah Layanan Pemberian obat pencegahan massal pada Kecacingan	Persen	94	100		100		100		100		100		100			
				Jumlah Jamaah Haji yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
		1.02.02. 2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan	orang	88.612	90.000	43.000.0 00.000	95.000	43.000.0 00.000	100.00 0	43.000.0 00.000	105.00 0	43.000.0 00.000	110.00 0	43.000.0 00.000	110.00 0	215.000. 000.000	Bidang Yankes, Seksi Kesehatan Rujukan	Kab. Kukar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Sample/Specimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Pengambilan & Pengiriman Sample/Specimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persen	100	100	50.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	290.000.000	Bidang P2PL, Seksi SIPKLB	Tersebar
		1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tatanan kawasan sehat	Kecamatan	-	7	50.000.000	10	100.000.000	13	100.000.000	15	100.000.000	18	100.000.000	18	450.000.000	Bidang P2PL, Seksi PL	Tersebar
		1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan	Puskesmas	32	32	32.000.000.000	32	32.000.000.000	32	32.000.000.000	32	32.000.000.000	32	32.000.000.000	32	160.000.000.000	UPTD. Puskesmas	Kab. Kukar
		1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Faskes Lainnya memberikan pelayanan penunjang kesehatan	Faskes lainnya	2	2	1.900.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	4.900.000.000	UPT. Elektromedik dan Gudang Farmasi	Kab. Kukar
		1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna	Persen	15,6	30	500.000.000	45	1.000.000.000	60	1.000.000.000	75	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	4.500.000.000	Bidang Yankes, Seksi Regulasi dan Peningkatan Mutu	Kab. Kukar
		1.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedia dan terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi pada faskes	Faskes	32	30	2.076.000.000	30	2.376.000.000	30	2.376.000.000	30	2.376.000.000	30	2.376.000.000	30	11.580.000.000	Bidang SDK	Kab. Kukar
		1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen data sasaran, data dasar Puskesmas, Data SPM Kesehatan dan Profil Kesehatan	Dokumen	3	3	500.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	2.900.000.000	Bidang SDK, Seksi DIK	Kab. Kukar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.02. 2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan Pusban yang menerapkan aplikasi SIKDA Generik dan tersedia media informasi kesehatan berbasis Web	Puskesmas	32	36	1.000.000.000	36	1.200.000.000	36	1.200.000.000	36	1.200.000.000	36	1.200.000.000	36	5.800.000.000	Bidang SDK, Seksi DIK	Kab. Kukar
		1.02.02. 2.03.03	Pengadaan Alat / Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Paket	1	1	576.000.000	1	576.000.000	1	576.000.000	1	576.000.000	1	576.000.000	5	2.880.000.000	Bidang SDK, Seksi DIK	Kab. Kukar
		1.02.02. 2.04.	Penerbitan Izin Rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Kabupaten/Kota	Terpantainya Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persen	100	100	600.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	5.800.000.000	Bidang Yankes, Seksi Kesehatan Rujukan	Kab. Kukar
		1.02.02. 2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat izin	Persen	100	100	250.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	3.850.000.000	Bidang Yankes, Seksi Kesehatan Rujukan	Kab. Kukar
		1.02.02. 2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas dan rumah sakit yang dilakukan Pemantauan dan Pelaporan	Faskes	20	35	350.000.000	35	400.000.000	35	400.000.000	35	400.000.000	35	400.000.000	35	1.950.000.000	Bidang Yankes, Seksi Kesehatan Rujukan	Kab. Kukar
	Menurunnya Angka Kematian Ibu	1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Terlatih sesuai Kompetensinya	Persen	68	68	1.050.000.000	70	1.750.000.000	75	1.750.000.000	80	1.750.000.000	85	1.750.000.000	85	8.050.000.000		Kab. Kukar
	Menurunnya Angka Kematian Bayi																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)																			
		1.02.03.2.01.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	izin	5000	1500	150.000.000	1500	350.000.000	1500	350.000.000	1500	350.000.000	1500	350.000.000	7500	1.550.000.000	Bidang Yankes, Seksi Regulasi dan Peningkatan Mutu	Kab. Kukar
		1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang dilakukan Pemantauan dan Pelaporan	Unit	32	35	150.000.000	35	350.000.000	35	350.000.000	35	350.000.000	35	350.000.000	35	1.550.000.000	Bidang Yankes, Seksi Regulasi dan Peningkatan Mutu	Kab. Kukar
		1.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	persen	64	64	500.000.000	70	900.000.000	75	900.000.000	80	900.000.000	85	900.000.000	85	4.100.000.000	Sekretariat, Subbag Kepegawaian	Kab. Kukar
		1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan	orang		44	500.000.000	44	400.000.000	44	400.000.000	44	400.000.000	44	400.000.000	220	2.100.000.000	Sekretariat, Subbag Kepegawaian	Kab. Kukar
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diterima dan difasilitasi	orang				44	500.000.000	44	500.000.000	44	500.000.000	44	500.000.000	176	2.000.000.000	Sekretariat, Subbag Kepegawaian	Kab. Kukar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM meningkat kompetensinya	orang	100	100	400.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	100	500.000.000	50	500.000.000	550	2.400.000.000	Sekretariat, Subbag Kepegawaian	Kab. Kukar
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM meningkat kompetensinya	orang	100	100	400.000.000	150	500.000.000	150	500.000.000	100	500.000.000	50	500.000.000	550	2.400.000.000	Sekretariat, Subbag Kepegawaian	Kab. Kukar
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terselenggaranya pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman	persen	100	100	316.250.000	100	353.500.000	100	353.500.000	100	353.500.000	100	353.500.000	100	1.730.250.000	Bidang SDK	Kab. Kukar
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memiliki izin	persen	100	100	140.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	780.000.000	Bidang SDK	Kab. Kukar
		1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana yang dibina dan diawasi	Persen	75	50	75.000.000	60	85.000.000	70	85.000.000	75	85.000.000	80	85.000.000	80	415.000.000	Bidang SDK, Seksi Farbekes	Kab. Kukar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah data perizinan dan tindak lanjut pengawasan yang dikelola	Dokumen	1 Dokumen	0	-	1	10.000.000	0	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	Bidang SDK, Seksi Farbekes	Kab. Kukar
		1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana pemohon pemenuhan komitmen perizinan yang difasilitasi	Persen	40	40	65.000.000	40	65.000.000	40	65.000.000	40	65.000.000	40	65.000.000	40	325.000.000	Bidang SDK, Seksi Farbekes	Kab. Kukar
		1.02.04.2.03.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya proses penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	sertifikat	15	15	97.750.000	15	105.000.000	15	105.000.000	15	105.000.000	15	105.000.000	75	517.750.000	Bidang SDK	Kab. Kukar
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang dibina dan diawasi	Persen	48	32	97.750.000	40	105.000.000	45	105.000.000	50	105.000.000	60	105.000.000	60	517.750.000	Bidang SDK, Seksi Farbekes	Kab. Kukar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.04.2.06.	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Persen	10	25	78.500.000	25	88.500.000	30	88.500.000	35	88.500.000	40	88.500.000	40	432.500.000	Bidang SDK	Kab. Kukar
		1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah kegiatan sampling terhadap produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan	Persen	10	25	78.500.000	25	78.500.000	30	78.500.000	35	78.500.000	40	78.500.000	40	392.500.000	Bidang SDK, Seksi Farbekes	Kab. Kukar
		1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga yang dikelola	Dokumen	0	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000	Bidang SDK, Seksi Farbekes	Kab. Kukar
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian RT-PHBS	Persen	26	30	373.500.000	32	662.000.000	34	662.000.000	36	662.000.000	40	662.000.000	40	3.021.500.000	Bidang Kesmas	Kab. Kukar
	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Puskesmas dengan Desa Germas.	Persen	28%	30%	150.000.000	35%	250.000.000	40%	250.000.000	50%	250.000.000	60%	250.000.000	60%	1.150.000.000	Bidang Kesmas, Seksi PMPK	Kab. Kukar
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pertemuan Puskesmas	Kali	1	2	150.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	1.150.000.000	Bidang Kesmas, Seksi PMPK	Kab. Kukar
				Jumlah Pendampingan Teknis Lapangan Puskesmas	Puskesmas	15	18		21		25		28		32		32		Bidang Kesmas, Seksi PMPK	Kab. Kukar
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Puskesmas dengan Memanfaatkan Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial aktif	Persen	30%	35%	100.000.000	45%	260.000.000	50%	260.000.000	55%	260.000.000	60%	260.000.000	60%	1.140.000.000	Bidang Kesmas, Seksi PMPK	Kab. Kukar
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Penyediaan Media Pendukung untuk Penerapan Germas Kabupaten dan Germas Desa di Puskesmas)	Jumlah Jenis Media	Jenis Media	9	9	100.000.000	10	260.000.000	10	260.000.000	11	260.000.000	11	260.000.000	11	1.140.000.000	Bidang Kesmas, Seksi PMPK	Kab. Kukar
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Desa Siaga aktif dengan UKBM aktif	Persen	20%	22%	123.500.000	32%	152.000.000	34%	152.000.000	36%	152.000.000	40%	152.000.000	40%	731.500.000	Bidang Kesmas, Seksi PMPK	Kab. Kukar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.05. 2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Bimbingan Teknis Ke Puskesmas tentang Penguatan Posyandu Aktif dan Puskesmas dengan Pembinaan Posyandu Aktif)	Jumlah Bimtek dan Supervisi UKBM di Puskesmas	Puskesmas	15	18	123.500.000	21	152.000.000	25	152.000.000	28	152.000.000	32	152.000.000	32	731.500.000	Bidang Kesmas, Seksi PMPK	Kab. Kukar

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggung jawaban yang terdiri dari berbagai indicator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Selain itu, system tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada public atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran program dan kegiatan berjalan dengan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas disetiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan indikator kinerja dengan tujuan, yaitu untuk:

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai perencana sekaligus penyelenggaraan pembangunan daerah. Pada Permendagri No. 18 Tahun 2020, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdapat IKK Outcame yang perlu dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Akan tetapi IKK Outcame berisikan SPM kesehatan yang sudah menjadi indikator sasaran dan tertuang dalam tabel TC-28, sehingga tidak dijabarkan secara terpisah.

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan dicapai 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel TC-28 dibawah ini:

Tabel TC-28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan:							
	<i>Umur Harapan Hidup</i>	72,34	72,78	73	73,22	73,44	73,66	73,66
	Indikator Sasaran (IKU perangkat daerah):							
	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	15	13	13	13	12	12	12
	Angka Kematian Ibu Per100.000 Kelahiran Hidup	233	215	208	201	193	186	186
	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)	0	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,72
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	80	82,5	85	87,5	90	90
II	INDIKATOR PROGRAM:							
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78,50	79	79,5	80	80,01	80,01
2.	Presentasi Balita Stunting	16,19	15,6	15,1	14,6	14,1	13,8	13,8
	Indeks Keluarga sehat	0,21	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
	Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	0,72	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,77
	Indeks Pelayanan kesehatan balita	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	0,78
	Indeks Pelayanan Penyakit menular	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,65
	Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	0,44	0,46	0,48	0,5	0,52	0,54	0,54
	Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89	0,9	0,9

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,34	0,36	0,38	0,4	0,42	0,45	0,45
	Indeks Perilaku kesehatan	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,49
	Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	18,75	21,88	25,00	28,13	31,25	34,38	34,38
3.	Persentase SDM yang Terlatih sesuai Kompetensinya	68	68	70	75	80	85	85
4.	Terselenggaranya pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Capaian RT-PHBS	26%	30%	32%	34%	36%	40%	40%
III	INDIKATOR KEGIATAN:							
1.	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	4	4	4
2.	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4	4	4	4	4	4	4
3.	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2	2	2	2	2	2	2
4.	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3	3	3	3	3	3	3
5.	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8	8	8	8	8	8	8
6.	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang diadakan	22	22	22	22	22	22	110
7.	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	12	12	12	12	12	12
8.	Jumlah Barang Milik Daerah	95	95	95	95	95	95	95
9.	Jumlah Puskesmas BLUD meningkat kinerjanya mendapatkan nilai AA	18	22	24	27	30	32	32
10.	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	70	72	74	76	78	80	80

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
11.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan difasilitas kesehatan	96	100	100	100	100	100	100
12.	Persentase KB Aktif	63,00	64	65	66	68	70	70
13.	Imunisasi Dasar lengkap(IDL)	84,00	93,6	94,1	94,3	94,6	95	95
14.	Tersedia dan terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi pada faskes	32	30	30	30	30	30	30
15.	Terpantaunya Pelayanan Kesehatan Rujukan	100	100	100	100	100	100	100
16.	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan yang diberikan	5000	1500	1500	1500	1500	1500	7500
17.	Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan	64	64	70	75	80	85	85
18.	Jumlah SDM meningkat kompetensinya	100	100	100	100	100	100	100
19.	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) memilki izin	100	100	100	100	100	100	100
20.	Terselenggaranya proses penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	15	15	15	15	15	15	75
21.	Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	10	25	25	30	35	40	40
22.	Prosentase Puskesmas dengan Desa Germas.	28%	30%	35%	40%	50%	60%	60%
23.	Prosentase Puskesmas dengan Memanfaatkan Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial aktif	30%	35%	45%	50%	55%	60%	60%
24.	Prosentase Desa Siaga aktif dengan UKBM aktif	20%	22%	32%	34%	36%	40%	40%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2022	2022	2022	2022	
IV	INDIKATOR SPM							
1.	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	99	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	34,1	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase sasaran usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	56	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22,2	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	82,4	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	84,2	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Presentase orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	61,79	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Persentase Orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	94,4	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB 8

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dengan mengacu dan selaras terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dokumen ini akan menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan beserta seluruh perangkat teknis dibawah koordinasinya dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta jajarannya mendeskripsikan tugas dan fungsinya ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Pada akhirnya, semua hal tersebut merupakan upaya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara, terutama Misi kedua yaitu **“Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya”**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara ini melibatkan berbagai pihak yang menjadi stakeholder pembangunan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, karenanya Dinas Kesehatan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah memberi kontribusi yang konstruktif sehingga dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 ini dapat terbentuk.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara.